

Mantan PM Kamboja Pangeran Norodom Ranariddh Meninggal Dunia

PHNOM PENH(IM) - Mantan Perdana Menteri Kamboja Pangeran Norodom Ranariddh telah meninggal di Prancis dalam usia 77 tahun. Kabar meninggalnya Norodom Ranariddh disampaikan langsung oleh Menteri Informasi Kamboja.

Pangeran Norodom Ranariddh, yang partai politik kerajaannya memenangkan pemilu pada 1993, digulingkan dalam kudeta 1997 oleh mitra koalisinya sekaligus pesaingnya Hun Sen. Nama terakhir tetap menjadi Perdana Menteri Kamboja lebih dari 20 tahun kemudian.

Menteri Penerangan Kamboja Khieu Kanharith mengatakan bahwa dia telah menerima informasi dari istana kerajaan bahwa Ranariddh telah meninggal di Paris seperti dikutip dari Reuters, Minggu (28/11).

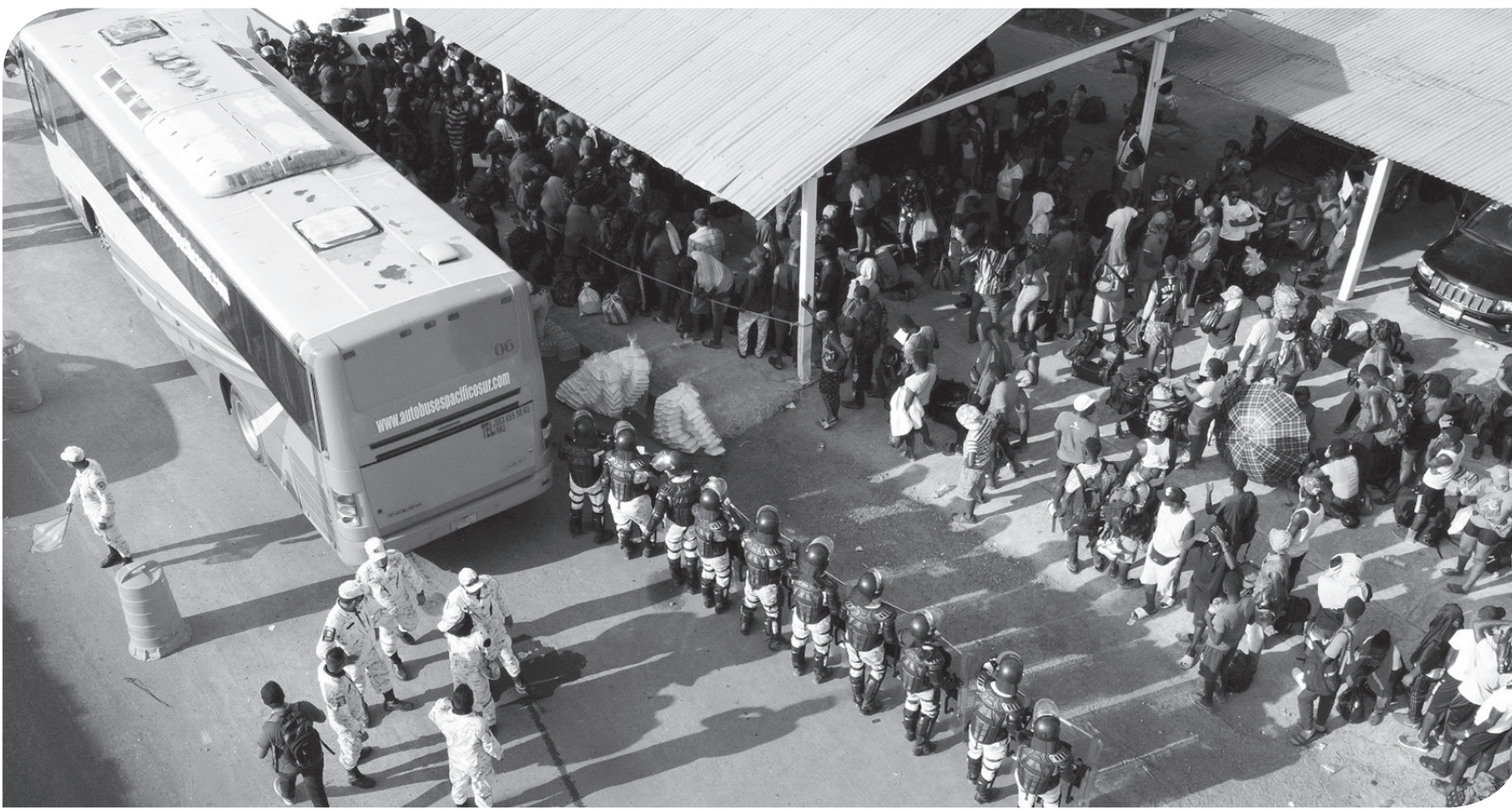
Ranariddh adalah anggota keluarga kerajaan Kamboja yang terkenal dalam dunia politik beberapa dekade terakhir. Ia terus memimpin partai royalis Funcinpec un-

tuk mengikuti pemilu selama bertahun-tahun setelah ia digulingkan.

Namun pada tahun 2017, dia mengecewakan lawan-lawan politik Hun Sen dengan mengatakan tidak ada pilihan selain bekerja sama dengan Hun Sen, yang telah secara efektif mengesampingkan semua partai oposisi dan sekarang memimpin parlemen satu partai.

Ranariddh muncul dari bayang-bayang ayahnya yang karismatik, Raja Norodom Sihanouk, dan memimpin partai Funcinpec-nya meraih kemenangan mengejutkan dalam pemungutan suara bersejarah yang dijalankan PBB pada 1993 yang akan mengakhiri lebih dari satu dekade perang saudara di Kamboja.

Meskipun dia memenangkan pemungutan suara, Ranariddh segera dikalahkan dan kemudian digulingkan oleh orang yang dengannya dia setuju untuk berbagi kekuasaan, Hun Sen, mantan pemimpin Komunis. ● gul



IDN/ANTARA

MIGRAN MENDAPATKAN VISA KEMANUSIAAN DARI PEMERINTAH MEKSIKO

Para migran mengantre untuk naik bus setelah menerima tawaran dari pemerintah Meksiko untuk meninggalkan karavan menuju AS dan mendapatkan visa kemanusiaan untuk transit di wilayah Meksiko dekat Escuintla, Meksiko, Minggu (28/11). Gambar diambil dengan drone.

Uni Eropa Tidak akan Akui Taliban

Taliban enggan disalahkan atas krisis ekonomi yang kini sedang membekap Afghanistan.

RUSSELS (IM)— Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan, Uni Eropa (UE) tidak akan mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Namun, perhimpunan Benua Biru akan berupaya membantu negara tersebut menangani krisis ekonomi. “UE tidak mengakui rezim baru yang dipaksakan melalui kekerasan. Tapi kita perlu mencegah keruntuhan ekonomi dan sosial yang akan segera dihadapi negara itu. Kita harus berdiri di samping rakyat Afghanistan,” kata von der Leyen dalam sebuah pernyataan pada Senin (29/11). Ia mencemaskan kian memburuknya krisis kemanusiaan di Afghanistan. “Tulah sebabnya bulan lalu kami mengumumkan paket senilai 1 miliar euro, termasuk 300 juta euro dalam bantuan kemanusiaan. Uni Eropa akan terus terlibat dengan negara-negara di kawasan ini,” ujar von der

Leyen.

Akhir Oktober lalu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan, Taliban memiliki iktikad membangun hubungan dengan dunia internasional. “Kesan saya secara keseluruhan bahwa Taliban sangat ingin melakukan dialog dan kerja sama dengan pihak luar dan mereka serius tentang hal ini,” ucapnya pada 27 Oktober lalu.

Dia turut mendesak Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) melanjutkan dukungan pembiayaan ke Afghanistan. Pun menyerukan AS dan negara Barat lain untuk mencabut sanksi terhadap Afghanistan. Dia menilai, sanksi-sanksi kian membuat Afghanistan terpuruk. “Afghanistan membutuhkan kebangkitan di semua lini, dan pembangunan adalah prioritas utama,” ujar Wang.

Wang meminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) me-

nyediakan lebih banyak vaksin bagi Afghanistan. Hal itu agar Afghanistan mampu memerangi pandemi Covid-19.

Dia mengungkapkan, Tiongkok akan mengirim bantuan kemanusiaan darurat senilai 30 juta dolar AS ke Afghanistan. Wang kembali mengingatkan bahwa Tiongkok selalu menyerukan komunitas internasional untuk terlibat, bukan mengisolasi Taliban selaku pemegang kekuasaan saat ini di Afghanistan.

Sementara, Taliban enggan disalahkan atas krisis ekonomi yang kini sedang membekap Afghanistan. Taliban mengklaim, mereka tengah bekerja memberantas praktik korupsi yang dilakukan pemerintahan sebelumnya.

“Kami tenggelam dalam masalah kami dan kami mencoba untuk mendapatkan kekuatan untuk membawa rakyat kami keluar dari kesengsaraan serta kesulitan dengan bantuan Allah,” kata Perdana Menteri Taliban di Afghanistan Mullah Mohammad Hassan Akhund dalam pidatonya pada Sabtu (27/11), dikutip laman Gulf Today.

Pada kesempatan itu, dia turut meyakinkan bahwa

Taliban ingin membangun hubungan dan kerja sama dengan berbagai negara. “Kami meyakinkan semua negara bahwa kami tidak akan mencampuri urusan dalam negeri mereka dan kami ingin memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan mereka,” ujarnya.

Pidato Akhund yang berdurasi 30 menit disiarkan di televisi pemerintah. Itu merupakan pidato pertamanya sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu. Pidato itu disampaikan menjelang pertemuan antara Taliban dan Amerika Serikat di Doha, Qatar, pekan depan.

Krisis ekonomi dan kemanusiaan di Afghanistan memburuk sejak Taliban menguasai kembali Afghanistan pada Agustus lalu. Aksi kejahatan, seperti penculikan dan perampokan, dilaporkan meningkat tajam di berbagai daerah, terutama ibu kota Kabul.

Pekan lalu, Taliban meminta Kongres AS mengambil langkah bertanggung jawab untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan ekonomi yang sedang berlangsung di Afghanistan. Menurut mereka, langkah Kongres dapat men-

cairkan aset Afghanistan yang dibekukan Pemerintah AS dan mencabut sanksi terhadap Afghanistan.

“Ketika bulan-bulan musim dingin semakin dekat di Afghanistan, dan dalam keadaan di mana negara kami telah dihantam virus korona, kekeringan, perang, dan kemiskinan, sanksi Amerika tidak hanya merusak perdagangan serta bisnis tetapi juga dengan bantuan kemanusiaan,” kata Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Mutaqqi dalam surat terbuka yang ditujukan untuk anggota Kongres AS pekan lalu, dikutip Anadolu Agency.

Dia mengungkapkan, pemerintahan Taliban terkejut saat Pemerintah AS mengumumkan penerapan sanksi pada aset bank sentral Afghanistan. “Ini bertentangan dengan harapan kami serta Perjanjian Doha,” ucapnya merujuk pada perjanjian damai antara AS dan Taliban yang tercapai pada Februari tahun lalu.

Saat ini, AS membekukan aset asing Afghanistan senilai lebih dari sembilan miliar dolar. Pembekuan itu dilakukan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu. ● tom

Politisi Selandia Baru Bersepeda ke Rumah Sakit untuk Melahirkan

SELANDIA BARU (IM)—Seorang politisi wanita asal Selandia Baru menuai sorotan jagat maya baru-baru ini. Pasalnya, dia pergi ke rumah sakit dengan menaiki sepeda dalam kondisi sedang kontraksi.

Anggota parlemen bernama Julie Anne Genter

membagikan kisahnya lewat unggahan di Facebook dan Instagram. Alhasil, kisah mengenai perjuangan ibu demi melahirkan ini menarik perhatian publik.

Namun ternyata, aksi menaiki sepeda saat kontraksi jalur melahirkan ini bukanlah aksi pertamanya.

Sebelumnya, Genter melakukan aksi serupa tiga tahun lalu. Dilansir Reuters,

Genter pernah bersepeda ke rumah sakit Auckland untuk melahirkan putranya. “Berita besar Pukul 03.04 pagi ini kami menyambut anggota terbaru dari keluarga kami,” tulis Genter. “Saya benar-benar tidak

berencana akan melahirkan, tetapi itu akhirnya terjadi,” lanjutnya.

Genter awalnya berangkat ke rumah sakit pada pukul 2 pagi. “Kontraksi yang saya alami tidak terlalu buruk ketika kami berangkat jam 2 pagi untuk pergi ke rumah sakit,” tutur dia.

Pada awalnya, rasa sakit akibat kontraksi yang dialami

Genter belum meningkat. Namun intensitasnya semakin tinggi membuat Genter harus pergi ke rumah sakit dengan cara tercepat, yakni menaiki sepeda. “Meskipun jaraknya 2 sampai 3 menit dan intensitasnya meningkat saat kami tiba 1 menit kemudian,” tutur dia. ● ans

Amerika Serikat Kembali Usir Diplomat Rusia

MOSKOW (IM)— Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat (AS) Anatoly Antonov mengatakan bahwa 27 diplomat dan keluarga mereka diusir dari Amerika Serikat. Mereka akan pergi pada 30 Januari.

“Diplomat kami diusir ... Sekelompok besar rekan saya, 27 orang dengan keluarga, akan meninggalkan kami pada 30 Januari ... Kami menghadapi kekurangan staf yang serius,” kata Antonov dalam sebuah wawancara video untuk siaran langsung Youtube Soloviev pada Minggu (28/11) malam.

Rusia sebelumnya mengatakan bahwa lebih dari 100 diplomatnya dengan keluarga telah dipaksa meninggalkan Amerika Serikat sejak 2016 ketika hubungan antara kedua negara memburuk.

Pada 29 Oktober lalu, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova, hampir 200 diplomat Rusia masih dalam pekerjaan di Amerika Serikat, termasuk staf misi Rusia untuk PBB.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bulan lalu bahwa staf misi AS di Rusia telah menyusut menjadi 120 dari 1.200 pada awal 2017.

Kondisi ini sia serangkaian pengusiran dan pembatasan, serta sulit untuk melanjutkan

apa pun selain kehadiran sementara di kedutaan.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskow berhenti memproses visa non-diplomatik tahun ini dan menambatkan orang Rusia ke daftar warga negara tunawisma yang hanya dapat mengajukan visa di negara ketiga.

Rusia menjadi negara ke-10 dalam daftar tersebut, setelah Kuba, Eritrea, Iran, Libya, Somalia, Sudan Selatan, Suriah, Venezuela, dan Yaman.

Pemerintah Rusia dan Amerika Serikat telah sekian lama berbeda pandangan soal berbagai masalah. Hubungan kedua negara juga semakin merosot setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa ia yakin Presiden Rusia Vladimir Putin adalah pembunuh.

Ketegangan sempat menurun usai Biden bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Putin pada 16 Juni. Pertemuan tersebut bahkan mengarah pada kembalinya aliran dana dari sejumlah investor asing ke obligasi pemerintah Rusia. “Kami berharap akal sehat akan menang dan kita bisa memulihkan keberadaan diplomat Rusia serta Amerika di Amerika Serikat dan Rusia berdasarkan prinsip timbal balik,” kata Antonov. ● gul

Putin Tarik Sebagian Besar Diplomat Rusia dari Korea Utara

PYONGYANG (IM)— Presiden Rusia Vladimir Putin menarik sebagian besar diplomat Rusia dari kantor Kedutaan Besar Korea Utara.

Dikutip NK News pada Senin (29/21), puluhan personel Kedutaan Besar Rusia meninggalkan Pyongyang menggunakan kereta, Rabu (24/11) lalu.

Hanya dua diplomat yang tetap berada di Korea Utara, termasuk Duta Besar Alexander Matsegora dan seorang teknisi.

Penarikan sejumlah diplomat itu juga diungkapkan oleh

pejabat Korea Selatan di Seoul.

Kelangkan komoditas sehari-hari yang dipicu pandemi Covid-19 dan pembatasan anti-virus di Korea Utara memang telah mendorong banyak diplomat asing keluar dari negara tertutup itu.

“Rusia biasanya memiliki Kedutaan Besar yang luas dan menampung sekitar 100 orang, tetapi pemerintahan mereka mengetahui bahwa sebagian besar dari mereka telah pergi,” kata pejabat di Kementerian Unifikasi dikutip dari Yonhap.

Namun, pejabat tersebut menolak berkomentar secara

spesifik atas laporan tersebut.

Kedutaan Besar Tiongkok dan Rusia saat ini menjadi perwakilan dari 9 negara asing yang masih ada di Korea Utara.

Pejabat itu menambahkan seluruh delapan badan PBB sudah tak berada lagi di Korea Utara. Pyongyang telah memberlakukan control perbatasan yang ketat dan pelarangan masuk sejak awal tahun lalu untuk menghindari penyebaran virus Covid-19.

Hal itu berujung pada penarikan sejumlah diplomat negara asing dari sana, termasuk Inggris dan Jerman. ● tom



IDN/ANTARA

PROGRAM MALAYSIA - SINGAPORE VACCINATED TRAVEL LANE

Sebuah pesawat Singapore Airlines yang membawa penumpang gelombang pertama mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) di bawah program Malaysia-Singapore Vaccinated Travel Lane (VTL), di Sepang, Malaysia, Senin (29/11).

Jepang Siap Tutup Pintu untuk Warga dan Pelancong Asing

TOKYO (IM)—Jepang berencana menutup perbatasannya dari semua pelancong dan warga asing. Hal itu dipengaruhi penemuan Covid-19 varian Omicron yang telah menyebar ke sejumlah negara.

Menurut seorang sumber yang diwawancara Reuters pada Senin (29/11), pelajar asing, pekerja magang asing, dan mereka yang ingin masuk ke Jepang untuk keperluan bisnis, turut tercekup dalam larangan. Namun warga Jepang yang tengah berada di luar negeri dan ingin pulang, diizinkan masuk.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida disebut akan mengumumkan penerapan larangan masuk tersebut pada Senin sore waktu setempat. Jika terealisasi, Jepang akan menjadi negara ketiga setelah Israel dan Maroko yang mengambil kebijakan demikian.

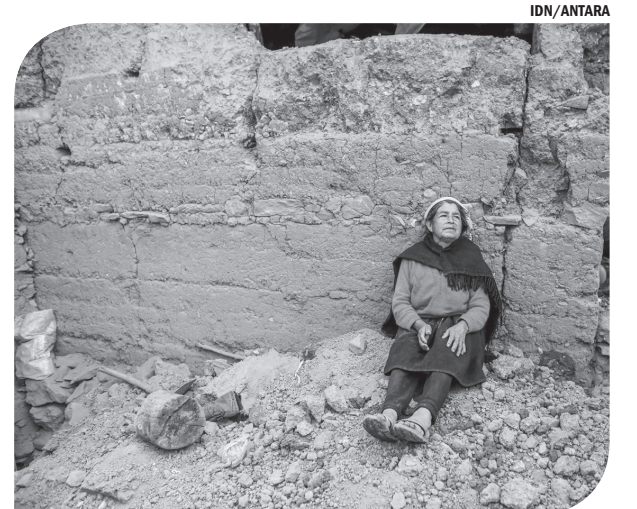
Pada 19 November lalu, Fumio Kishida telah mengumumkan paket stimulus senilai 56 triliun yen atau setara Rp6.971 triliun (dengan kurs Rp124,49 per yen). Dana itu bakal dimanfaatkan untuk menyokong proses pemulihan akibat pandemi yang belum merata di negara tersebut.

Kishida mengatakan, stimulus tersebut cukup un-

tuk memberikan rasa aman dan harapan kepada rakyat Jepang. “Kami telah mampu membangun langkah-langkah ekonomi yang akan membuka masyarakat baru setelah pandemi,” ujar Kishida pada pembicaraan kebijakan antara kabinet dan koalisi yang berkuasa.

Stimulus senilai 56 triliun yen itu nantinya akan dialokasikan untuk beberapa keperluan. Salah satunya pemberian uang tunai dan kupon kepada keluarga dengan anak berusia di bawah 18 tahun yang memenuhi batas pendapatan. Selain itu, dana akan turut digunakan untuk menaikkan gaji perawat dan tenaga kesehatan.

Jepang sudah memiliki beban utang publik yang sangat besar. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), jumlahnya telah mencapai 250 persen dari produk domestik bruto. Sebelum Kishida, dua mantan perdana menteri Jepang terakhir, yakni Shinzo Abe dan Yoshihide Suga telah mengurangi dana masing-masing senilai 38 triliun yen dan 40 triliun yen untuk perekonomian pada 2020. Sejumlah analis dan media meragukan keefektifan pengeluaran tersebut. ● ans



IDN/ANTARA

BENCANA GEMPA DI PERU

Seorang wanita beristirahat di luar rumah yang terkena dampak gempa di Jalca Grande, di wilayah Amazonas, Peru, Minggu (28/11).

22 Warga Sipil Tewas dalam Serangan di Tempat Pengungsi Kongo

BUNIA (IM)— Tempat pengungsi Ivo di timur laut Republik Demokratik Kongo diserang kelompok bersenjata. Akibatnya, 22 warga sipil tewas dalam serangan tersebut.

Dilansir dari AFP, Senin (29/11), serangan yang merenggut 22 nyawa warga itu terjadi pada Minggu (28/11). Pada pekan lalu, serangan serupa juga terjadi di tempat pengungsi itu dan menewaskan 29 orang.

Koordinator Palang Merah Mambo Batu Mance mengatakan kepada AFP bahwa 20 orang segera dimakamkan di dua kuburan umum. Sementara dua lainnya yang meninggal karena luka-luka mereka dimakamkan kemudian.

Dia menuduh kelompok bersenjata Koperasi untuk Pembangunan Kongo (CODECO) yang melakukan serangan itu.

Kivu Security Tracker (KST), pemantau kekerasan

yang berbasis di AS yang dihormati di wilayah tersebut, menyebutkan jumlah korban tewas yang sama.

Juru bicara militer di wilayah itu, Letnan Jules Ndong, mengatakan pemberontak CODECO berhasil dipukul mundur, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut.

Provinsi Ituri yang kaya emas telah jatuh kembali ke dalam siklus kekerasan sejak akhir 2017 dengan munculnya milisi CODECO, yang sejak itu terpecah menjadi faksi-faksi yang bersaing. Ituri dan Kivu Utara yang berdekatan telah dikeping sejak 6 Mei, suatu tindakan luar biasa untuk memerangi kelompok-kelompok bersenjata termasuk CODECO dan Pasukan Demokrat Sekutu (ADF).

Otoritas sipil telah digantikan oleh perwira militer dan polisi. Dua serangan lainnya terjadi Sabtu malam di tempat lain di Ituri, menyebabkan total sembilan warga sipil tewas. ● gul